

ISSN : 2615-8620
Katalog : 3205005.12

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MARET

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MARET

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA, MARET 2021

ISSN : 2615-8620
Katalog : 3205005.12
No. Publikasi : 12000.2175
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : x + 66 hal

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Dicetak Oleh:

C.V. Rabbani

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

TIM PENYUSUN

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA UTARA, MARET 2021

Penanggung Jawab Umum:
Dr. Syech Suhaimi, SE, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:
Azantaro, SE, M.Si

Editor:
Cahyono Panca Aridesyadi, S.ST

Penulis:
Laila Syafrita Siregar ,S.ST,M.M
Akhmad Ignace Hariman S, S.ST,M.Si

Cover dan
Prio Arif Budiman

Infografis:
Adelina Octavia Sihombing

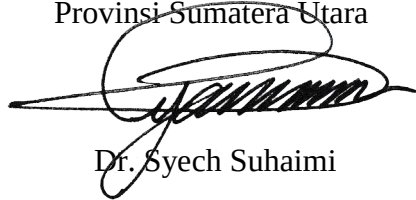
KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia. Persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat di Sumatera Utara. Salah satu aspek penting untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan adalah diperlukan data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu.

Publikasi ini menyajikan metodologi, data dan informasi serta analisis kemiskinan Sumatera Utara Maret 2021. Diharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai pada Maret 2021 sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk perencanaan pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi peneliti, akademisi, dan pemakai data umumnya.

Kepada semua pihak yang telah turut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran bagi penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Medan, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara



Dr. Syech Suhaimi

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	 3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan	5
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II. KAJIAN LITERATUR	 9
2.1 Definisi Kemiskinan	9
2.2 Data Kemiskinan	11
2.3 Penghitungan Kemiskinan Makro	14
2.4 Indikator Kemiskinan	18
2.5 Distribusi Pengeluaran	19
 BAB III. ANALISIS KEMISKINAN	 25
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara	25
3.1 Garis Kemiskinan	27
3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P_0)	36
3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan	38
3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan	40
 BAB IV. ANALISIS KETIMPANGAN	 45
4.1 Gini Rasio	45
4.2 Kriteria bank Dunia	47
 PENUTUP	 51
Daftar Pustaka	57
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan antara Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro	13
Tabel 3.1 Garis Kemiskinan Sumatera Utara menurut Daerah dan Komponennya, Maret 2020 – Maret 2021 (Rp/kapita/bulan).....	31
Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, Maret 2020 – Maret 2021	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Ilustrasi Garis Kemiskinan 17
Gambar 2.2	Kurva Lorenz 20
Gambar 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2009 – 2021 27
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, Maret 2021 28
Gambar 3.3	Garis Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2020 – Maret 2021 (Rp/kapita/bulan)..... 30
Gambar 3.4	Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terhadap Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2021 32
Gambar 3.5	Share Basket Komoditi Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2021..... 33
Gambar 3.6	Share Basket Komoditi Non Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Non Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2021..... 35
Gambar 3.7	Share Basket Komoditi Makanan dan Non Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2021 37
Gambar 3.8	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara dan Indonesia Berdasarkan Daerah, Maret 2020 – Maret 2021 39
Gambar 3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index – P₁</i>) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2020 – Maret 2021..... 41
Gambar 3.10	Indeks Keparahan Kemiskinan (<i>Poverty Severity Index – P₂</i>) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2020 – Maret 2021..... 43
Gambar 3.11	Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2020–Maret 2021 45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Gambar 3.12 Perbandingan Gini Rasio Sumatera Utara dan Indonesia, Maret 2020 – Maret 2021	46
Lampiran 1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021	61
Gambar 3.13 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara, Maret 2021	47
Lampiran 2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2021 ...	62
Gambar 3.14 Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, menurut Kriteria Bank Dunia, Maret 2021	63
Lampiran 3 Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021	48
Lampiran 4 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021	64

Tujuan Penyusunan Profil Kemiskinan

- ✓ mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sampai dengan Maret 2021.
- ✓ mengetahui distribusi pengeluaran penduduk di Sumatera Utara Maret 2021.



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang kompleks dan mencakup berbagai aspek. Akibat kompleksitas yang dimilikinya, maka penanggulangan kemiskinan memerlukan program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia dan menjadi syarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan program pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) dan dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG's) untuk periode 2015-2030. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan lebih peka terhadap isu kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan suatu kebijakan strategis yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan tersedianya data dan

Diperlukan tersedianya data dan informasi kemiskinan yang akurat dan *up to date* sehingga program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

informasi kemiskinan yang akurat dan *up to date* sehingga program pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran.

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.

Ravallion (1992), menyebutkan bahwa pengukuran kemiskinan dapat dipercaya menjadi instrumen yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka (BPS & World Bank, 2002).

Di Indonesia, data mengenai kemiskinan telah tersedia di berbagai sumber. Namun demikian, untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi program pembangunan, pemerintah menggunakan data kemiskinan yang bersumber resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data kemiskinan yang bersumber dari BPS menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. BPS selain mengeluarkan data kemiskinan makro juga mengumpulkan data kemiskinan mikro. Akan tetapi, data kemiskinan yang dirilis oleh BPS hanya data kemiskinan makro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk *geographical targeting* sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan *household targeting* seperti untuk *social protection* yang pengelolaan datanya dilakukan oleh Kemensos dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali dilakukan oleh BPS pada tahun 1984, dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin periode 1976-1981. Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan.

Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Sejak tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas KOR dan pada tahun 2011-2015 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi Triwulan I, II, III, dan IV. Sejak tahun 2015-sekarang, penghitungan kemiskinan dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret untuk menghitung kemiskinan level kabupaten/kota dan bulan September untuk menghitung kemiskinan level provinsi.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sampai dengan Maret 2021.
- b. Untuk mengetahui distribusi pengeluaran penduduk di Sumatera Utara Maret 2021.

1.3 RUANG LINGKUP DAN DATA YANG DIGUNAKAN

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi Maret 2021. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Maret 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 21.310 rumah tangga di Sumatera Utara.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi publikasi, maka sistematika penulisan dibagi ke dalam empat bab, yaitu:

- Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.
- Bab II. Kajian Literatur, menjelaskan tentang definisi kemiskinan, data kemiskinan, dan penghitungan kemiskinan makro.
- Bab III. Analisis Kemiskinan, menjelaskan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan distribusi pengeluaran penduduk.
- Bab IV. Penutup.

Klasifikasi Rumah Tangga Miskin (RTS)

konsumsi per
kapita per bulan
berada di bawah
0,8 x GK

**Sangat
Miskin**

konsumsi per
kapita per bulan
berada di antara
0,8 GK dan 1 GK.

Miskin

konsumsi per
kapita per bulan
berada di antara
1 GK dan 1,2 GK.

**Hampir
Miskin**

konsumsi per
kapita per bulan
berada di antara
1,2 GK dan 1,6 GK.

**Rentan
Miskin**

KAJIAN LITERATUR

2.1 DEFINISI KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004).

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) dalam *World Bank Institute* (2005), kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin.

Pandangan mengenai kemiskinan berikutnya adalah bahwa kemiskinan tidak hanya sebatas ukuran moneter, tetapi juga mencakup miskin nutrisi yang diukur dengan memeriksa apakah pertumbuhan anak-anak terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Selanjutnya pandangan yang lebih luas mengenai kemiskinan adalah kemiskinan ada jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai atau kesehatan yang

buruk, atau ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak bebas berpendapat.

Definisi kemiskinan yang digunakan di berbagai negara bermacam-macam. Kemiskinan sering dipandang sebagai ketidakmampuan untuk membayar biaya hidup minimal (Bank Dunia, 1990) walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa kemiskinan juga merupakan kurangnya akses terhadap jasa-jasa seperti pendidikan, kesehatan, informasi, serta kurangnya akses masyarakat terhadap partisipasi pembangunan dan politik. Definisi kemiskinan dapat juga dipandang dari sisi relatif dan sisi absolut:

1. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu Negara pada waktu tertentu.

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Indonesia melalui BPS mengadopsi definisi kemiskinan secara absolut yaitu dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tujuannya adalah untuk membandingkan kemiskinan secara umum dan menilai efek dari kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan antar waktu.

2.2 DATA KEMISKINAN

Pada dasarnya, data kemiskinan terdiri dari dua jenis yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk *geographical targeting* sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan *household targeting* seperti untuk *social protection*. Kedua data tersebut memiliki kriteria, pengukuran, dan cakupan kemiskinan yang berbeda.

BPS melakukan penghitungan data kemiskinan makro yang digunakan untuk *geographical targeting* untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan.

Pendekatan pertama, yaitu kemiskinan makro yang dihitung oleh BPS adalah data kemiskinan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Kemiskinan makro dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dari kebutuhan dasar ini dihitung suatu garis yang disebut garis kemiskinan. Selanjutnya, yang dikategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang pengeluarannya ada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan moneter. Keberadaan data kemiskinan makro tidak hanya menjawab berapa jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara agregat, namun juga menelaah sejauh mana kedalaman dan keparahan kemiskinan di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).

Pendekatan kedua adalah kemiskinan mikro yang penghitungannya menggunakan pendekatan non moneter yaitu dengan menggunakan kriteria akses

terhadap kebutuhan dasar. Data kemiskinan mikro dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu. Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan menggunakan metode *Proxy Means Testing (PMT)*. *PMT* digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga. Data kemiskinan mikro sering disebut data rumah tangga sasaran (RTS) yang digunakan untuk penyaluran program penanggulangan kemiskinan.

Di Indonesia, pendataan kemiskinan mikro sudah dilakukan empat kali. Pertama, data kemiskinan mikro yang bersumber dari Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE 2005), selanjutnya Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS 2008), Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011), yang terbaru adalah Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 (PBDT 2015). Perbedaan antara data kemiskinan makro dan mikro di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbandingan antara Data Kemiskinan Makro dan Data Kemiskinan Mikro

Data Kemiskinan Makro	Data Kemiskinan Mikro
1. Metodologi: - Konsep: <i>Basic Needs Approach</i> - Pendekatan Moneter - Didasarkan pada Garis Kemiskinan Makanan (2100 kkal/kapita/hari) + Non Makanan esensial.	1. Metodologi: - Konsep: Multi Dimensi - Pendekatan Non Moneter - Didasarkan pada Indeks atau <i>Proxy Means Test</i> (PMT) dari ciri-ciri Rumah Tangga Miskin (variabel non-moneter) yang dapat dikumpulkan dengan mudah.
2. Sumber data: Susenas	2. Sumber data: Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE-05), PPLS 2008, PPLS 2011, PBDT 2015
3. Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan estimasi	3. Data menunjukkan jumlah RT sasaran – <i>by name by address</i>
4. Digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, tapi tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin	4. Digunakan untuk target sasaran rumah tangga secara langsung pada Program Bantuan dan Perlindungan Sosial (BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, KIS, KIP, PSKS, dll)

Sumber: BPS

Dalam perkembangannya, untuk mempermudah pengguna memahami data dan menentukan sasaran program, maka dikembangkan kategorisasi dalam mengklasifikasikan RTS oleh BPS, yaitu:

- 1) Sangat miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di bawah 0,8 x Garis Kemiskinan (GK)
- 2) Miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 0,8 GK dan 1 GK.

- 3) Hampir miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 1 GK dan 1,2 GK.
- 4) Rentan miskin, adalah mereka yang konsumsi per kapita per bulan berada di antara 1,2 GK dan 1,6 GK.

2.3 PENGHITUNGAN KEMISKINAN MAKRO

Data kemiskinan yang bersumber dari Susenas merupakan data makro yang hanya menunjukkan jumlah agregat. Penentuan penduduk miskin diperoleh dengan menggunakan nilai garis kemiskinan, yaitu penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

BPS (2014) menyebutkan bahwa untuk mengukur kesejahteraan digunakan pendekatan yang berdasarkan pada pengeluaran per kapita. Setelah itu, dibangun standar minimum dari indikator kesejahteraan tersebut untuk membagi penduduk menjadi miskin dan tidak miskin. Standar minimum tersebut dikenal sebagai Garis Kemiskinan (GK). Untuk menentukan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan dasar, BPS menggunakan metode *Food Energy Intake (FEI)*. Pada metode *FEI* ini, nilai kuantitas dan harga setiap komoditi yang terpilih berubah sesuai dengan perubahan pola konsumsi dari penduduk referensi (20 persen penduduk yang pengeluarannya berada di atas Garis Kemiskinan Sementara) dan basket komoditi (sekelompok komoditi makanan dan non makanan terpilih yang dikonsumsi rumah tangga) ditentukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*).

Tahapan penghitungan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan kelompok penduduk referensi (*reference population*) yang didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. Penduduk referensi merupakan 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Penentuan GKS didasarkan pada Garis Kemiskinan (GK) periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Berdasarkan penduduk referensi tersebut selanjutnya dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- 2) Menentukan GKM yang merupakan penjumlahan dari nilai pengeluaran 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari (mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978). Formula dasar dalam menghitung GKM adalah:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \times Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan:

GKM_j = GKM daerah ke- j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kkal)

P_{jk} = Harga komoditi ke- k di daerah ke- j

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi ke- k yang dikonsumsi di daerah ke- j

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi ke- k di daerah ke- j

j = Daerah (perkotaan dan perdesaan)

Selanjutnya menentukan kebutuhan minimum makanan yang diperoleh dari nilai kalori setiap komoditi makanan yaitu GKM_j disetarakan dengan 2.100 kkal dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah ke- j dari penduduk referensi.

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

$$= \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}} \times 2100$$

Keterangan:

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah ke- j , yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari

K_{jk} = Kalori dari komoditi ke- k di daerah ke- j

$\overline{HK}_j$ = Harga rata-rata kalori di daerah ke- j

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi ke- k di daerah ke- j

- 3) Menentukan GKNM yang merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan). Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$GKNM_j = \sum_{i=1}^n r_i x V_i$$

Keterangan:

$GKNM_j$ = Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah ke- j

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub kelompok non-makanan ke- i menurut daerah

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/subkelompok non makanan terhadap sub kelompok pengeluaran ke- i menurut daerah

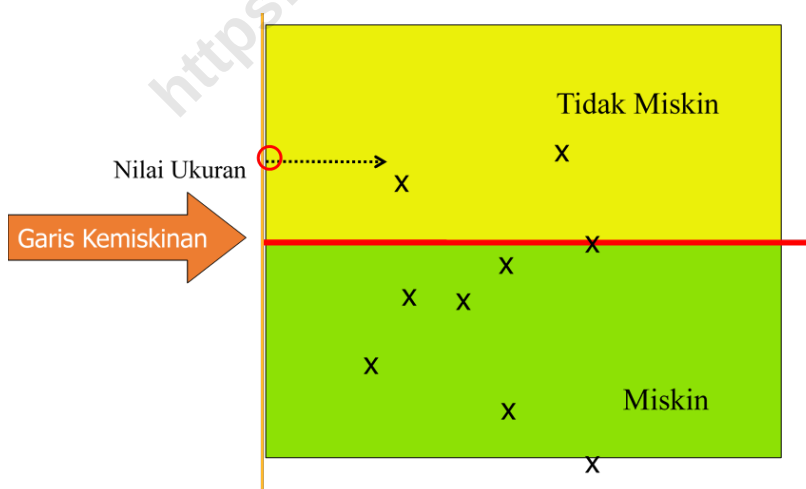
i = Jenis komoditi non makanan terpilih ke- i di daerah ke- j

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

- 4) Menghitung Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

$$GK = GKM + GKNM$$

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Gambar 2.1
Ilustrasi Garis Kemiskinan

2.4 INDIKATOR KEMISKINAN

Secara umum terdapat tiga indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu persentase kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

a) Persentase Kemiskinan (*Head Count Index* – P_0)

Digunakan untuk mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* – P_1)

Merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan.

c) Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P_2)

Memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ukuran tingkat kemiskinan menggunakan Formula *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT)

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α = 0, 1, 2

z = GK

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah GK ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

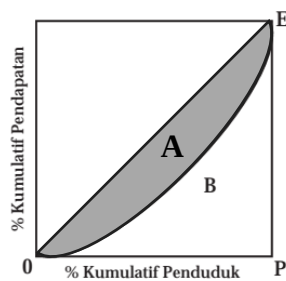
Ketiga indeks tersebut merupakan keluarga indeks kemiskinan yang sering digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan antar waktu maupun wilayah. Menurut Madden dan Smith (2000), kelemahan ketiga indeks tersebut dalam mengetahui perubahan tingkat kemiskinan adalah sensitif terhadap pemilihan garis kemiskinan maupun ukuran tingkat kemiskinan artinya apabila digunakan ukuran tingkat kemiskinan yang berbeda atau posisi garis kemiskinan diubah akan diperoleh kesimpulan yang berbeda.

2.5 DISTRIBUSI PENGELUARAN

2.5.1 Gini Rasio

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Ada sejumlah alat atau media untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Alat atau media yang lazim digunakan adalah Gini Rasio.

Gini Rasio adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Todaro (1989) menyatakan bahwa Gini Rasio akan dapat dijelaskan dengan menggunakan Kurva Lorenz. Dengan menggunakan Kurva Lorenz maka tingkat pemerataan akan dapat diketahui dengan jalan membandingkan antara bidang yang terletak diantara garis diagonal dengan Kurva Lorenz (bidang yang diarsir) dengan bidang setengah bujur sangkar.



Gambar 2.2
Kurva Lorenz

Gambar 2.2 menjelaskan bahwa sumbu horisontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase penduduk tersebut. Sedangkan garis diagonal di tengah disebut garis pemerataan sempurna, karena setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir. *Gini Ratio* merupakan rasio (perbandingan) antara luas bidang A yang diarsir dengan luas segitiga OPE. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai nol karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian angka koefisiennya sama dengan nol. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga Koefisien Gini bernilai satu.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol, sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini makin mendekati satu.

Data yang diperlukan dalam penghitungan Gini Ratio:

- 1) Jumlah rumah tangga atau penduduk
- 2) Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Rumus untuk menghitung Gini Rasio:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dengan: P_i : Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke- i

Q_i : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran
sampai kelas ke- i

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1, jika:

- ♦ $G < 0,4$ → Tingkat ketimpangan rendah
- ♦ $0,4 \leq G \leq 0,5$ → Tingkat ketimpangan sedang/*moderate*
- ♦ $G > 0,5$ → Tingkat ketimpangan tinggi

Menurut Todaro dan Smith (2006), Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria, antara lain:

1) Prinsip anonimitas (*anonymity principle*)

Ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

2) Prinsip independensi skala (*scale independence principle*)

Ukuran ketimpangan seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara mengukur pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada apakah mengukur pendapatan dalam *dollar*, *sen*, *rupee* atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin.

3) Prinsip independensi populasi (*population independence principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk).

4) Prinsip transfer (*transfer principle*)

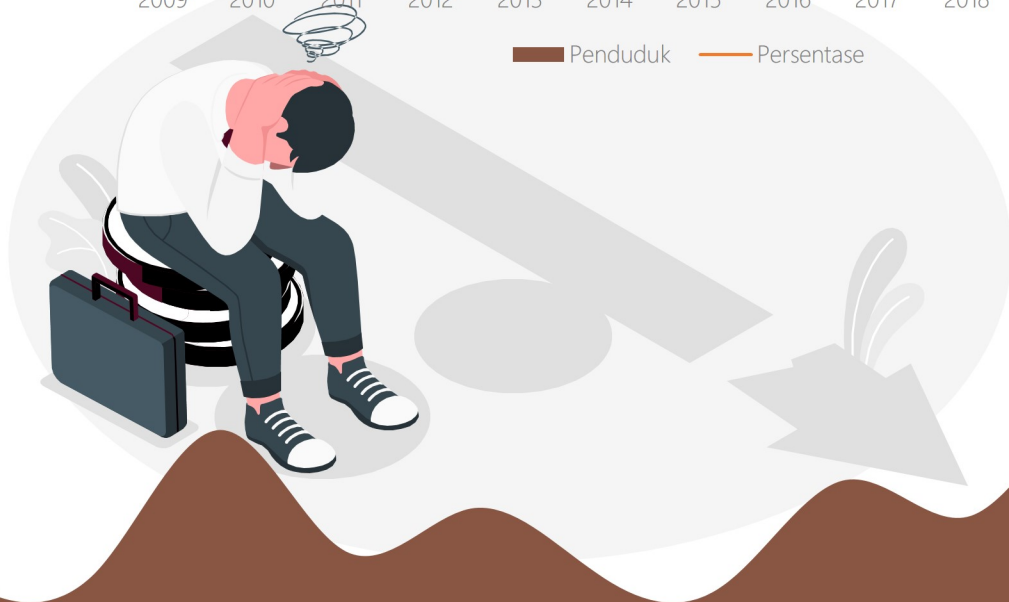
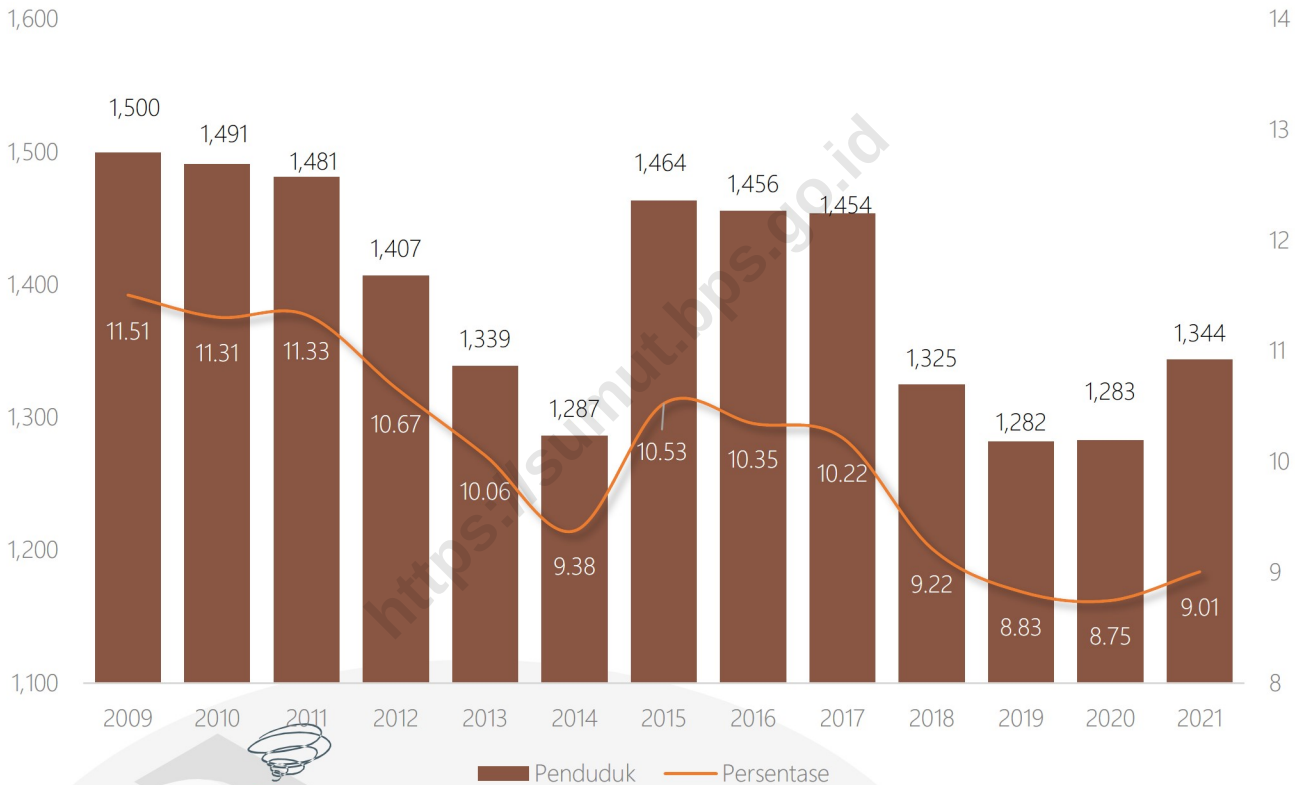
Prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip *Pigou-Dalton*. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika seseorang mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak hingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

2.5.2 Kriteria Bank Dunia

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- 1) Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen.
- 2) Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen.
- 3) Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase (%) Penduduk Miskin Sumatera Utara Maret 2009 – Maret 2021

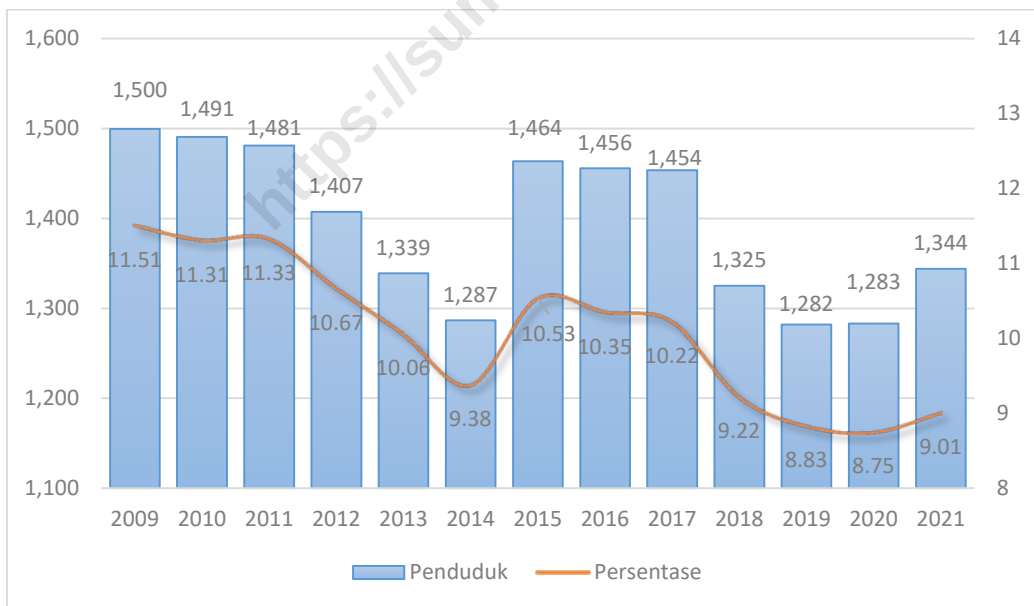


ANALISIS KEMISKINAN

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN SUMATERA UTARA

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode tahun 2009 – 2021 ditunjukkan pada Gambar 3.1. Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Gambar 3.1
Jumlah (000 Jiwa) dan Persentase (%) Penduduk Miskin Sumatera Utara
Maret 2009 – Maret 2021

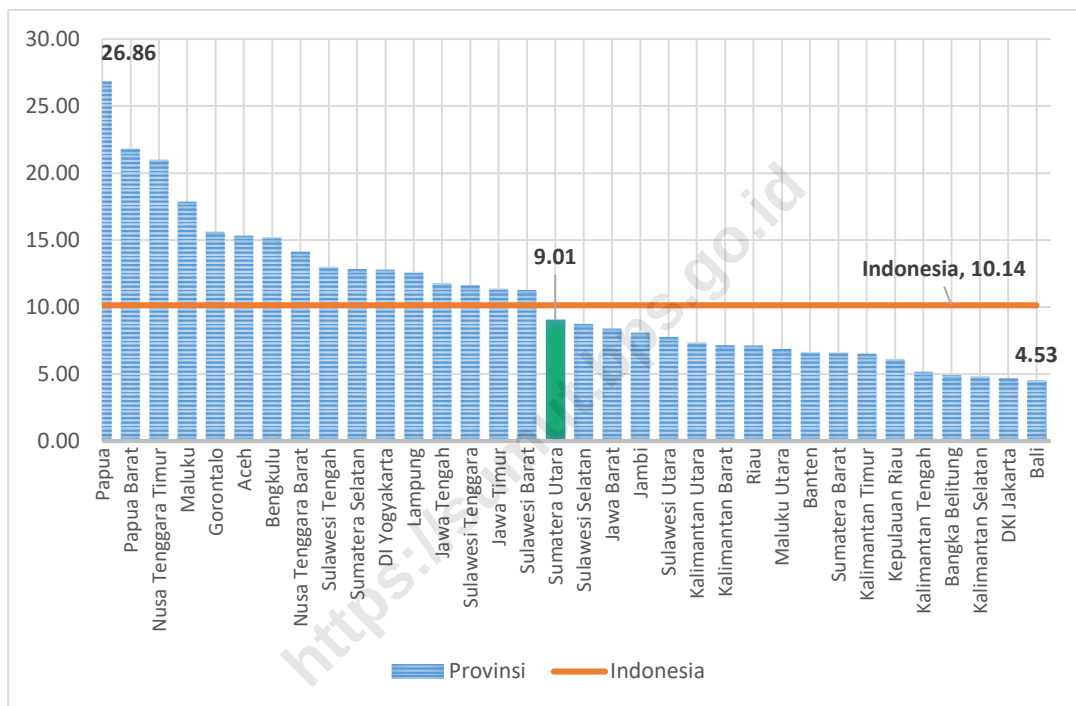


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2009- Maret 2021

Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode Maret 2009 – Maret 2021 sebesar 155,82 ribu jiwa, yaitu dari 1.499,68 ribu jiwa pada

Maret 2009 menjadi 1.343,86 ribu jiwa pada Maret 2021. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 11,51 persen pada Maret 2009 menjadi 9,01 persen pada Maret 2021.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi
Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Pada Maret 2021 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada di bawah persentase penduduk miskin Indonesia, akan tetapi persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dan menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 10,14 persen dan Sumatera Utara 9,01 persen.

Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menempati peringkat ke-17 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tiga provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di kawasan timur Indonesia antara lain Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2020 – Maret 2021

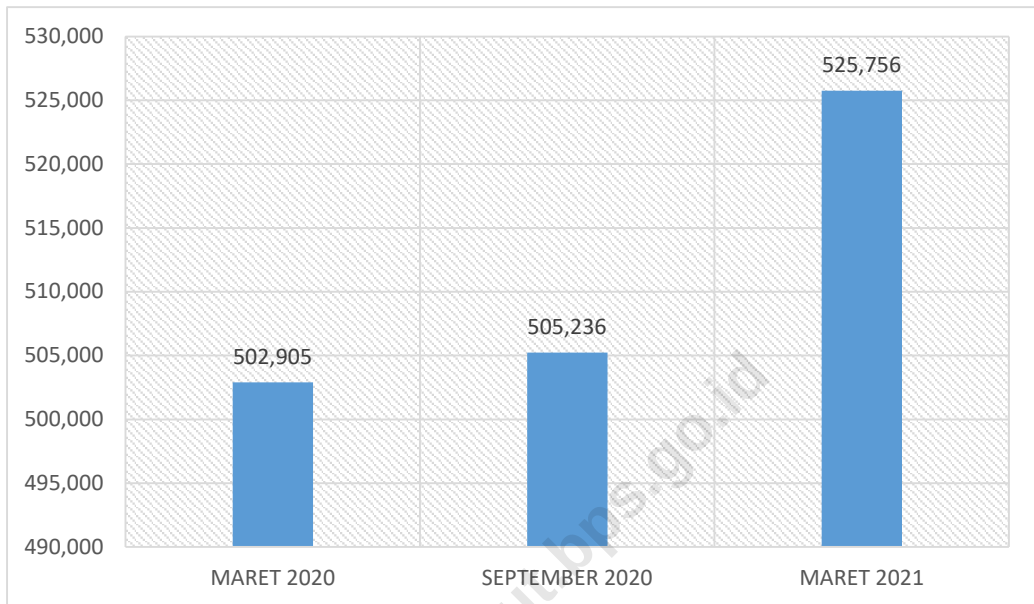
Perubahan tingkat kemiskinan melalui analisis tren tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020 – Maret 2021 mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

3.1 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan komponen penting dalam menentukan penduduk miskin. Penghitungan garis kemiskinan didasarkan pada sejumlah komoditi yang ditentukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) yang dikonsumsi oleh kelompok penduduk referensi (20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara). Komoditi dikelompokkan menjadi dua yaitu basket komoditi makanan dan non makanan. Basket komoditi makanan digunakan untuk menentukan garis kemiskinan makanan, sedangkan basket komoditi non makanan digunakan untuk menentukan garis kemiskinan non makanan.

Berdasarkan garis kemiskinan, penduduk dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan.

Gambar 3.3
Garis Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2020 – Maret 2021
(Rp/kapita/bulan)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020– Maret 2021

Perkembangan garis kemiskinan selama periode Maret 2020– Maret 2021 cenderung meningkat secara konsisten. Garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2020 adalah Rp. 502.904,- per kapita per bulan. Angka ini pada Maret 2021 meningkat sekitar 4,54 persen hingga menjadi Rp. 525.756,- per kapita per bulan.

Berdasarkan daerah, garis kemiskinan di perkotaan meningkat sebesar Rp. 24.867,- per kapita per bulan atau 4,80 persen yaitu dari Rp. 518.218,- per kapita per bulan pada Maret 2020 meningkat menjadi Rp. 543.085,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Sedangkan, garis kemiskinan di perdesaan meningkat sebesar Rp. 19.968,- per kapita per bulan atau 4,12 persen yaitu dari Rp. 484.717,- per kapita per bulan pada Maret 2020 meningkat menjadi Rp. 504.685,- per kapita per bulan pada Maret 2021.

Tabel 3.1
Garis Kemiskinan Sumatera Utara menurut Daerah dan Komponennya
Maret 2020 – Maret 2021 (Rp/kapita/bulan)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan	Non Makanan	Total
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2020	376 919	141 299	518 218
September 2020	378.679	141.850	520.529
Maret 2021	397.996	145.089	543.085
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2020	376 656	108 061	484 717
September 2020	378.550	108.091	486.642
Maret 2021	391.979	112.706	504.685
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2020	376 790	126 114	502 904
September 2020	126.114	126.619	505.236
Maret 2021	395.104	130.652	525.756

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020 - Maret 2021

Garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di perdesaan. Hal ini disebabkan karena harga komoditi di perkotaan umumnya lebih tinggi dari harga di perdesaan serta komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan lebih beragam, sehingga menyebabkan pengeluaran penduduk di perkotaan menjadi lebih tinggi dibanding di perdesaan.

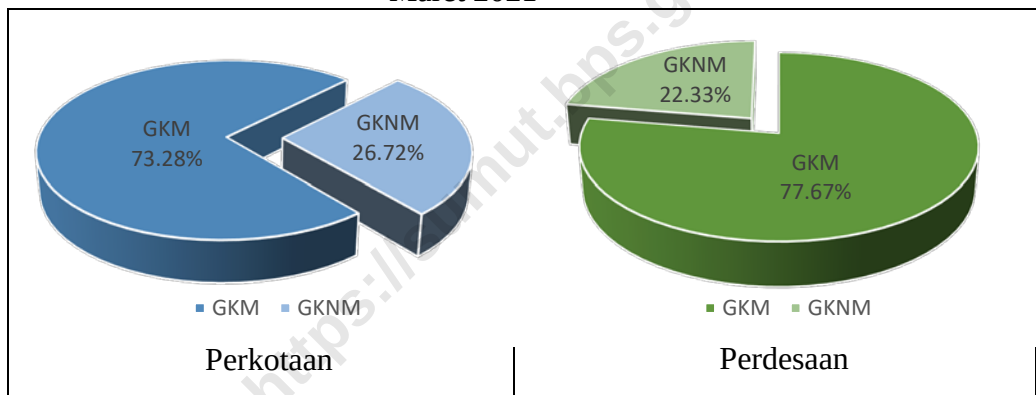
A. Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan

Dilihat berdasarkan daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan garis kemiskinan makanan mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibanding perkotaan. Di perdesaan, kontribusi garis

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap Garis Kemiskinan (GK).

kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 77,67 persen, dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 22,33 persen. Sedangkan di perkotaan, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,28 persen, dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 26,72 persen. Hal ini menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan makanan di daerah perkotaan maupun perdesaan masih merupakan komponen utama bagi kelangsungan hidup masyarakat di Sumatera Utara.

Gambar 3.4
Kontribusi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) terhadap Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah, Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

B. *Share Basket Komoditi Makanan*

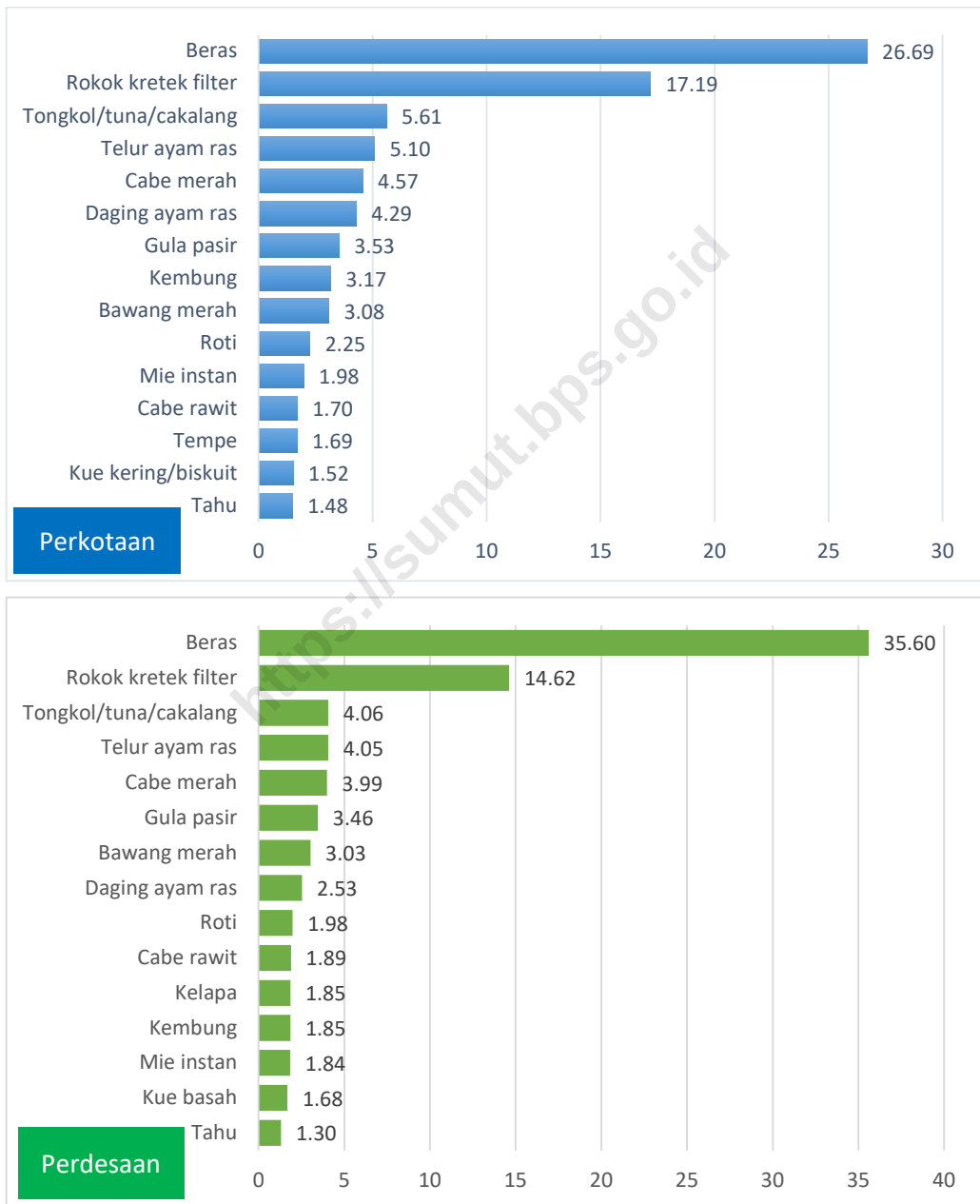
Garis kemiskinan makanan mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap garis kemiskinan dibandingkan garis kemiskinan non makanan. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan paling

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan garis kemiskinan yang secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk miskin adalah melalui pengendalian harga beras.

besar dalam pengukuran garis kemiskinan makanan adalah beras. Hal ini wajar

karena beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Sumatera Utara dan Indonesia pada umumnya.

Gambar 3.5
Share Basket Komoditi Makanan Utama terhadap
Garis Kemiskinan Makanan Berdasarkan Daerah (%), Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021,

Pada Maret 2021, sumbangan beras terhadap garis kemiskinan makanan adalah sebesar 26,69 persen di perkotaan dan 35,60 persen di perdesaan. Terlihat bahwa lebih dari seperempat garis kemiskinan makanan baik di perdesaan maupun di perkotaan dibentuk dari pengeluaran untuk membeli beras. Oleh karena itu, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kestabilan garis kemiskinan yang secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk miskin adalah melalui pengendalian harga beras.

Komoditi makanan lainnya yang mempunyai sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan makanan adalah rokok kretek filter yaitu sebesar 17,19 persen di perkotaan dan sebesar 14,62 persen di perdesaan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian oleh para pengambil kebijakan maupun peneliti, karena rokok kretek filter adalah komoditi yang tidak menghasilkan kalori tapi memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap garis kemiskinan makanan. Seyogyanya, pengeluaran untuk rokok kretek filter oleh penduduk tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat.

Selain beras, rokok kretek filter merupakan komoditi yang memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan.

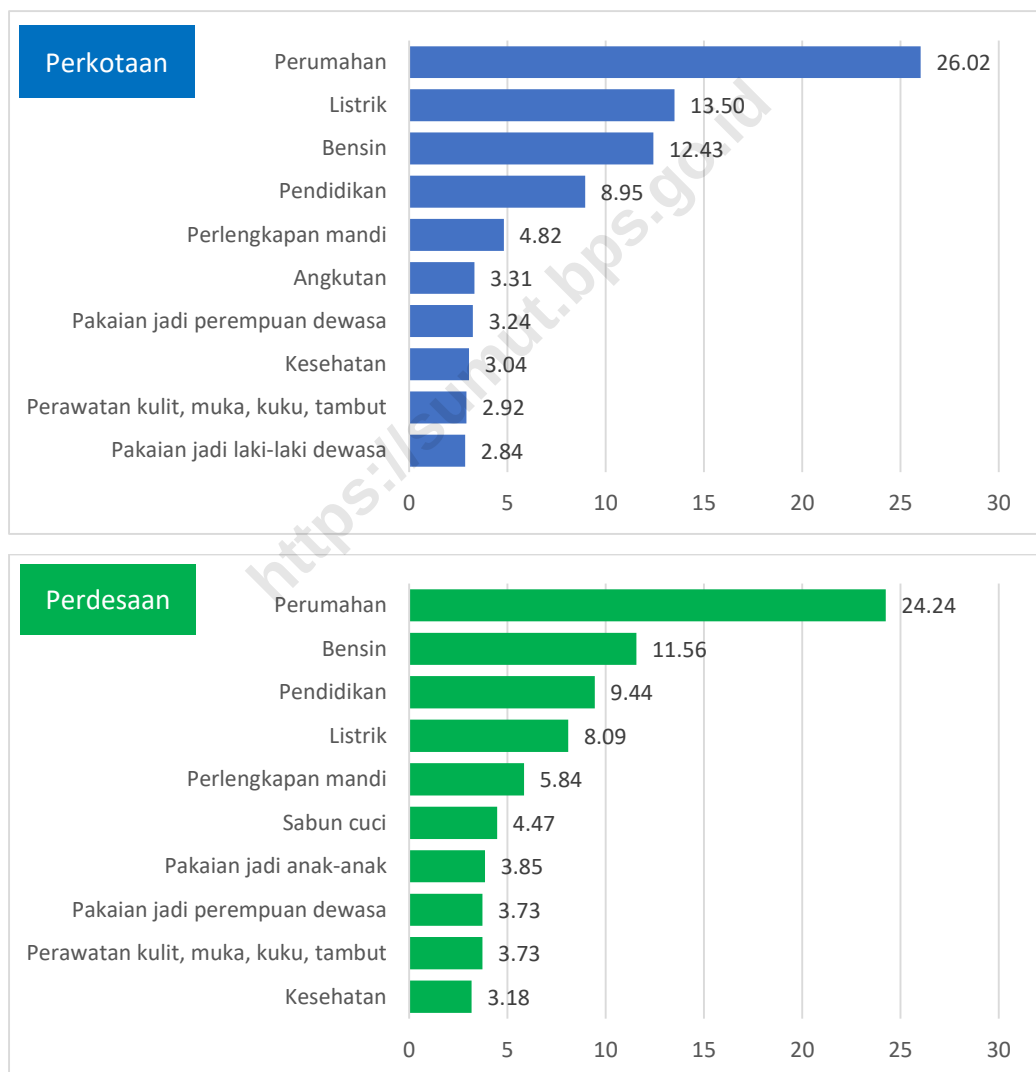
C. *Share* Basket Komoditi Non Makanan

Pada Maret 2021, komoditi non makanan yang memberikan sumbangan terbesar kepada garis kemiskinan non makanan adalah perumahan. Perumahan merupakan salah satu kebutuhan papan utama masyarakat.

Share komoditi perumahan terhadap garis kemiskinan non makanan adalah 26,02 persen di perkotaan dan 24,24 persen di perdesaan. Selain itu, komoditi yang memberikan sumbangan terbesar kedua di perkotaan adalah listrik yaitu sebesar 13,50 persen sedangkan di daerah perdesaan komoditi penyumbang terbesar kedua adalah bensin dengan sumbangan sebesar 11,56 persen. Kedua

komoditi ini merupakan komoditi yang harganya dikendalikan oleh pemerintah. Perubahan harga dari kedua komoditi ini akan memberikan dampak relatif besar terhadap kemiskinan karena kontribusinya yang cukup besar terhadap garis kemiskinan.

Gambar 3.6
Share Basket Komoditi Non Makanan Utama terhadap
Garis Kemiskinan Non Makanan Berdasarkan Daerah, Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

D. *Share* Basket Komoditi Makanan dan Non Makanan terhadap Garis Kemiskinan

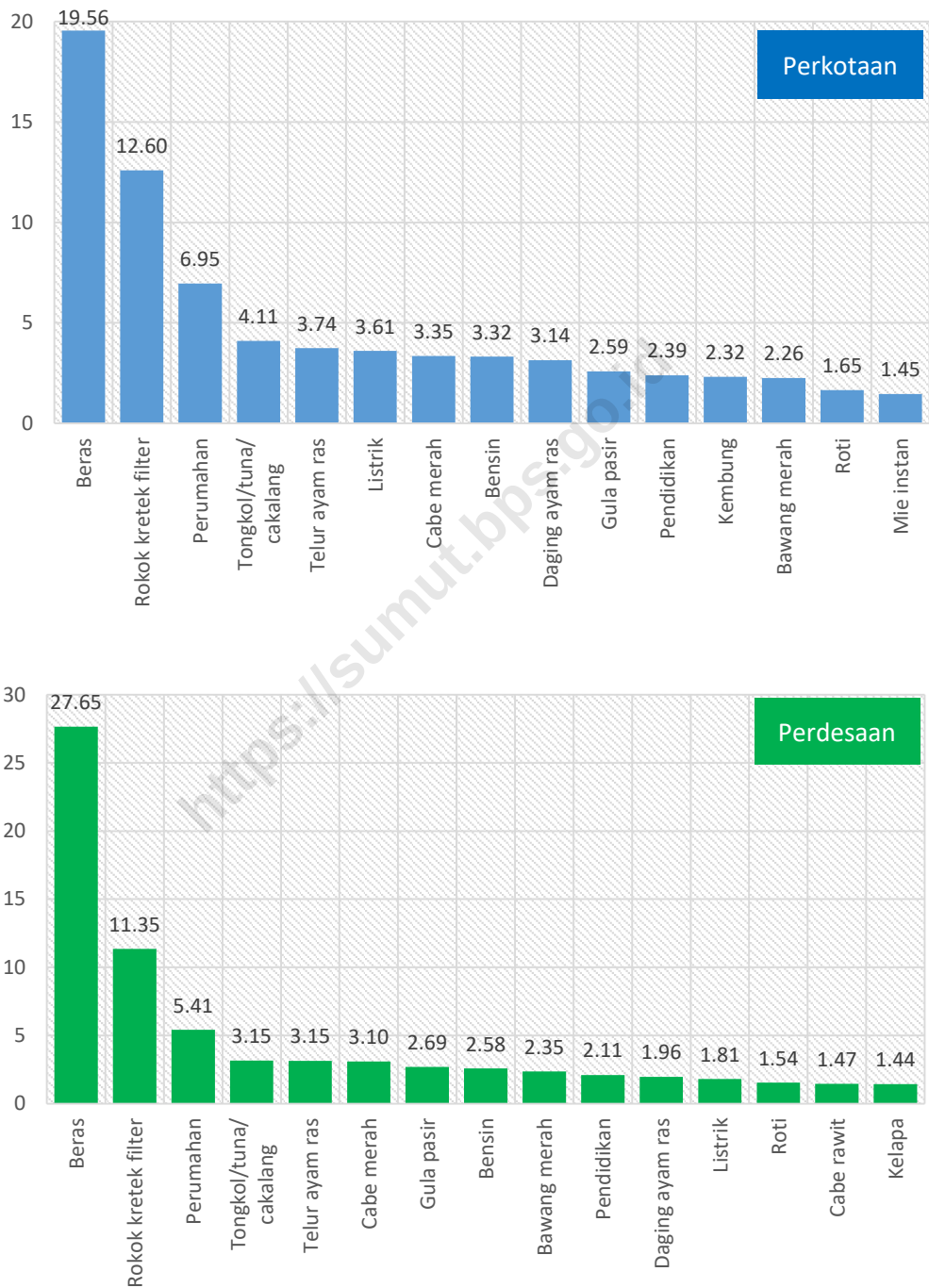
Apabila dilihat secara keseluruhan, *share* basket komoditi yang terdiri dari 52 jenis komoditi makanan dan 36 jenis komoditi non makanan, terhadap garis kemiskinan, tiga komoditi yang memberikan sumbangan terbesar

Tiga komoditi yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, dan perumahan.

terhadap garis kemiskinan baik perkotaan maupun perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, dan perumahan. Di perkotaan, *share* komoditi tersebut terhadap garis kemiskinan secara berturut-turut sebesar 19,56 persen, 12,60 persen, dan 6,95 persen. Sedangkan di perdesaan sebesar 27,65 persen, 11,35 persen dan 5,41 persen.

Berdasarkan *share* basket komoditi terhadap garis kemiskinan, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun program-program pembangunan. Pemerintah diharapkan bisa mengendalikan harga komoditi yang memberikan sumbangan besar terhadap garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena peningkatan harga dari sejumlah komoditi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa mempengaruhi peningkatan garis kemiskinan.

Gambar 3.7
Share Basket Komoditi Makanan dan Non Makanan Utama terhadap
Garis Kemiskinan Berdasarkan Daerah (%), Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin (P₀)

Perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara selama periode Maret 2020 – Maret 2021 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 60,57 ribu orang atau secara persentase bertambah sebesar 0,26 poin, yaitu dari 1.283,29 ribu orang (8,75 persen) pada Maret 2020 menjadi 1.343,86 ribu orang (9,01 persen) pada Maret 2021. Penurunan persentase penduduk miskin dari periode September 2020 ke periode Maret 2021 menunjukkan bahwa pada periode September 2020 dampak pandemi covid-19 cukup signifikan, sudah mulai melandai pada periode pendataan Maret 2021, namun belum mampu kembali ke posisi sebelum pandemi.

Tabel 3.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara
Maret 2019 – Maret 2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
<u>Perkotaan</u>				
Maret 2020	695,75	8,73	60,06	0,42
September 2020	756,24	9,25		
Maret 2021	755,81	9,15		
<u>Perdesaan</u>				
Maret 2020	587,54	8,77	0,51	0,07
September 2020	600,48	9,02		
Maret 2021	588,05	8,84		
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>				
Maret 2020	1 283,29	8,75	60,57	0,26
September 2020	1.356,72	9,14		
Maret 2021	1.343,86	9,01		

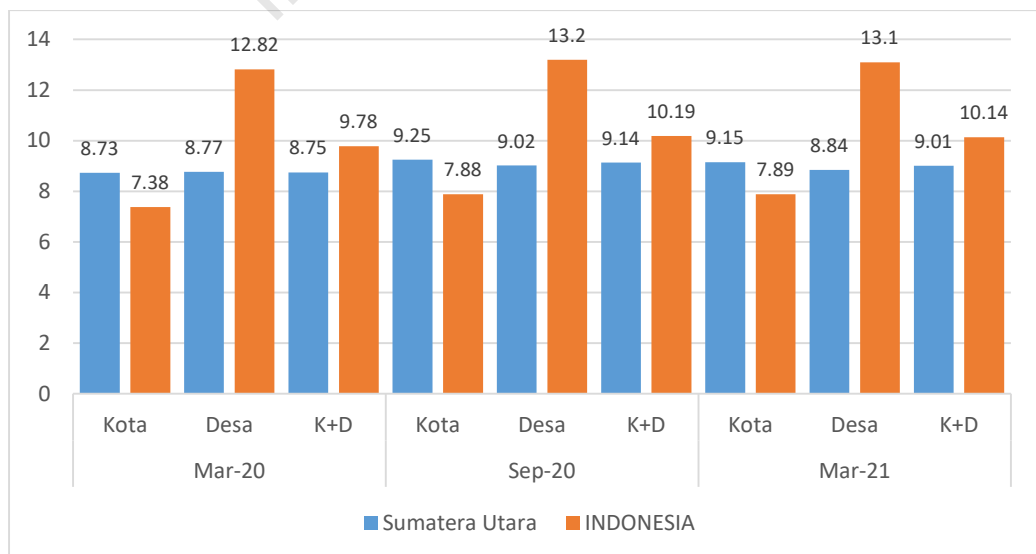
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020 – Maret 2021

Apabila dilihat berdasarkan daerah, pada periode Maret 2020 – Maret 2021, penduduk miskin mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin, yaitu dari 8,73 persen menjadi 9,15 persen atau naik sekitar 60.060 orang, yaitu dari 695,75 ribu orang menjadi 755,81 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,07 poin dari 8,77 persen menjadi 8,84 persen atau bertambah sekitar 510 orang, yaitu dari 587,54 ribu orang menjadi 588,05 ribu orang.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara lebih rendah dibanding persentase penduduk miskin di Indonesia. Apabila dilihat perkembangan di tiap periode selama Maret 2020 – Maret 2021, baik di Indonesia maupun Sumatera Utara mempunyai pola yang sama yaitu cenderung mengalami kenaikan pada periode September 2020-Maret 2021,

Gambar 3.8
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
di Sumatera Utara dan Indonesia Berdasarkan Daerah,
Maret 2020– Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020 – Maret 2021

Pada Maret 2020, persentase penduduk miskin Indonesia adalah sebesar 9,78 persen mengalami kenaikan pada September 2020 menjadi 10,19 persen dan mengalami sedikit penurunan pada Maret 2021 menjadi 10,14. Demikian juga dengan Sumatera Utara, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dari 8,75 persen pada Maret 2020 menjadi 9,14 persen pada September 2020 dan mengalami penurunan menjadi 9,01 persen pada Maret 2021.

Apabila dilihat berdasarkan daerah, persentase penduduk miskin di perkotaan Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin daerah perkotaan di Indonesia, akan tetapi sebaliknya persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Indonesia.

Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin di perkotaan Sumatera Utara adalah 9,15 persen dan di perkotaan Indonesia adalah 7,89 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Utara adalah 8,84 persen dan di perdesaan Indonesia adalah 13,10 persen.

3.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index - P₁*)

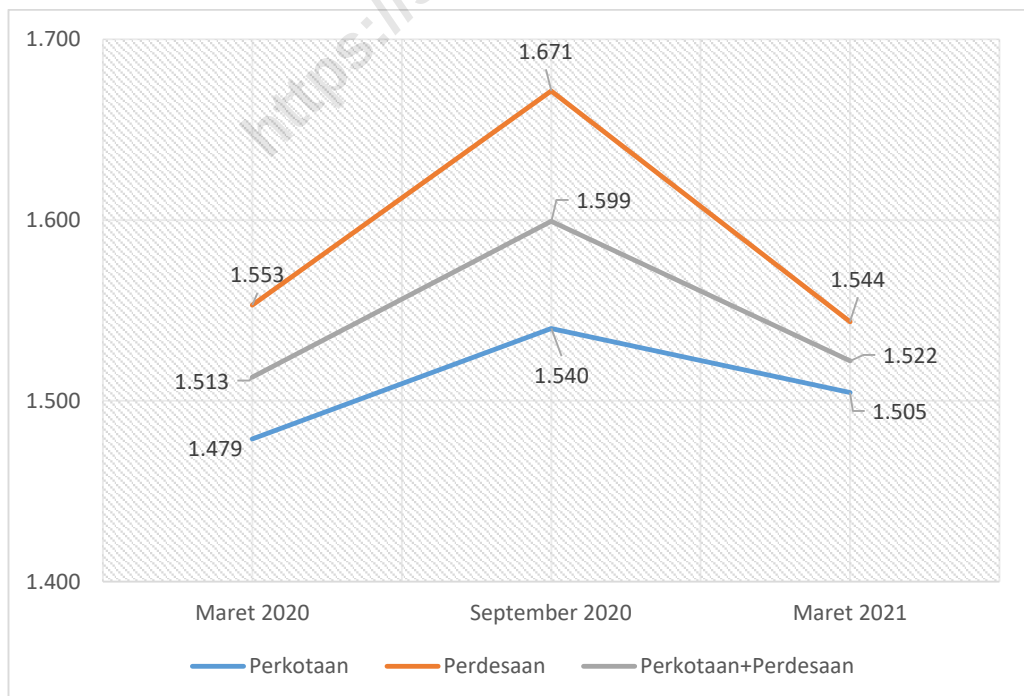
Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Agar tujuan pembangunan lebih tepat sasaran maka informasi kemiskinan tidak cukup hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi dibutuhkan informasi lain, salah satunya adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain untuk upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P_1) merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai

pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.

Semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Intervensi program pengentasan kemiskinan relatif lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Gambar 3.9
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P₁*) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2020 – Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020 – Maret 2021

Selama periode Maret 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumatera Utara meningkat sebesar 0,009 poin, yaitu dari 1,513 pada Maret 2020 menjadi 1,522 pada Maret 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

Dari segi wilayah, Indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan. Pada periode Maret 2020– Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,026 poin, yaitu dari 1,479 pada Maret 2020 menjadi 1,505 pada Maret 2021, artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung makin menjauhi garis kemiskinan.

Akan tetapi, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perdesaan, pada periode Maret 2020 – Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 0,009 poin, yaitu dari 1,553 pada Maret 2020 menjadi 1,544 pada Maret 2021. Artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan.

Selama periode Maret 2020 – Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Sumatera Utara di perkotaan mengalami kenaikan namun di daerah perdesaan mengalami penurunan. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung makin menjauhi garis kemiskinan sedangkan di perdesaan sebaliknya.

3.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index - P2*)

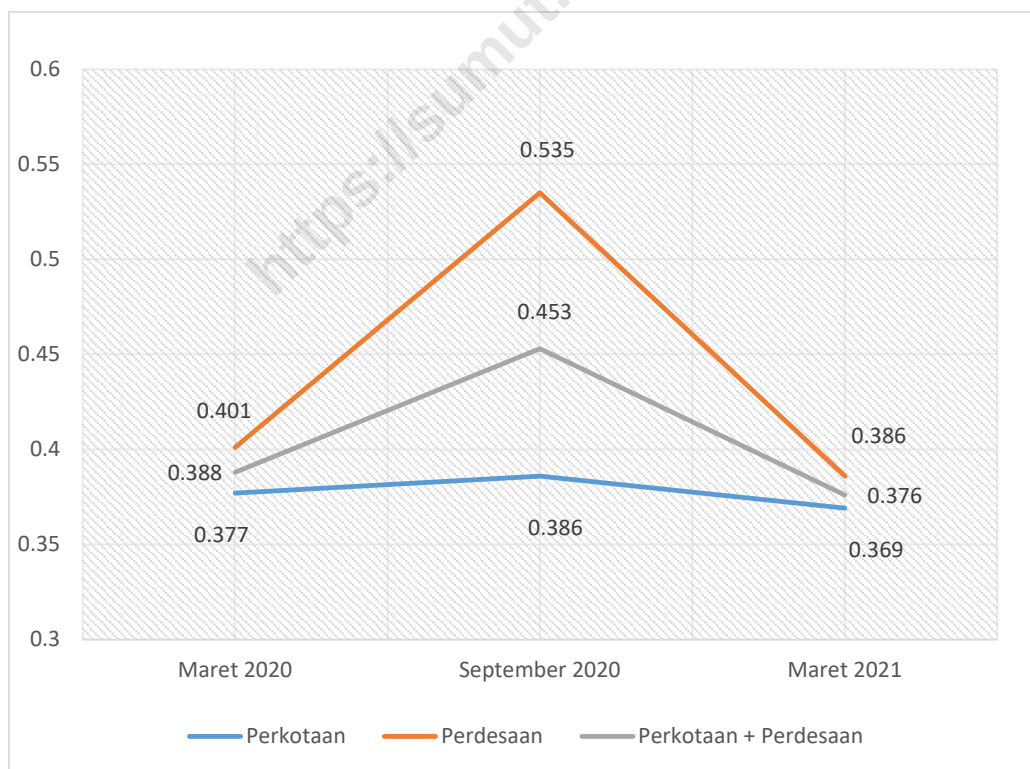
Indeks Keparahan Kemiskinan (yang sering dinotasikan dengan P_2) merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode Maret 2020 – Maret 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Utara menurun sebesar 0,012 poin, yaitu dari 0,388 pada Maret 2020

menjadi 0,376 pada Maret 2021. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sumatera Utara semakin rendah.

Apabila dilihat dari segi wilayah, Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki ketimpangan yang lebih rendah daripada ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan. Pada Maret 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan sebesar 0,377, mengalami penurunan sebesar 0,008 poin menjadi 0,369 pada Maret 2021.

Gambar 3.10
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P₂*) Sumatera Utara menurut Daerah, Maret 2020 – Maret 2021



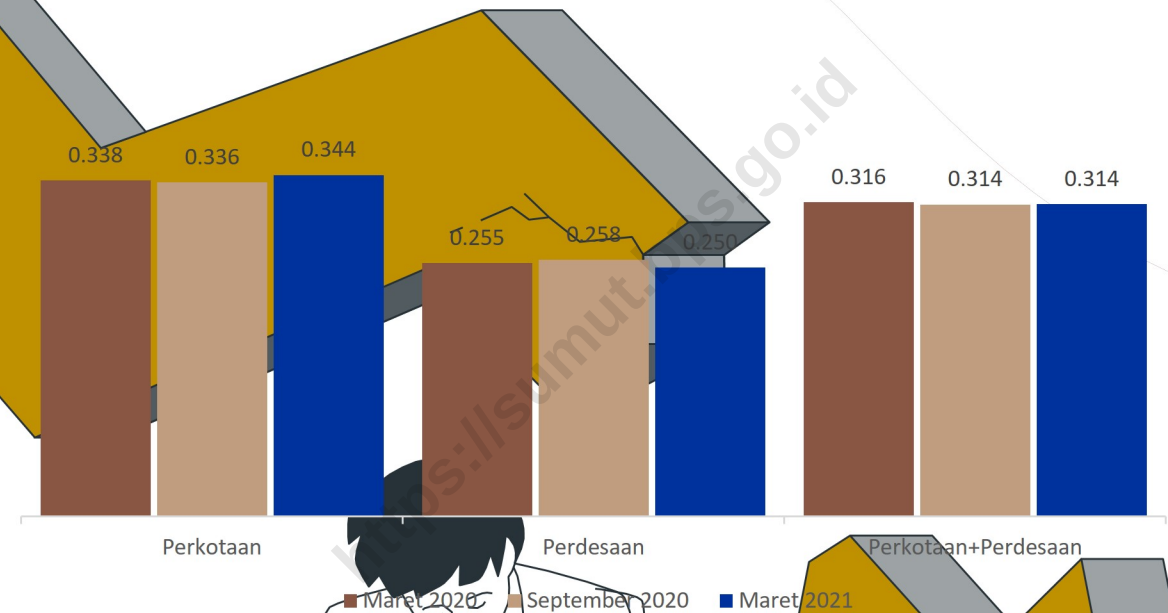
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020 – Maret 2021

Selama kurun waktu setahun terakhir, Indeks Keparahana Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan Artinya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan semakin rendah.

Indeks Keparahana
Kemiskinan di daerah
perdesaan lebih tinggi
dibandingkan di perkotaan.
Pada Maret 2020 Indeks
Keparahana Kemiskinan di

perdesaan 0,401, mengalami penurunan sebesar 0,015 poin menjadi 0,386 pada Maret 2021. Hal ini memberikan gambaran bahwa selama Maret 2020 – Maret 2021, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin rendah.

Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah Maret 2020 - Maret 2021



ANALISIS KETIMPANGAN

4. DISTRIBUSI PENGELUARAN PENDUDUK SUMATERA UTARA

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, aspek penting yang juga perlu diperhatikan adalah mengenai ketidakmerataan atau kesenjangan distribusi pengeluaran penduduk. Kesenjangan distribusi pengeluaran merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Kebijakan pembangunan yang menempatkan kota sebagai pusat pertumbuhan justru menghasilkan ketimpangan wilayah.

4.1. Gini Rasio

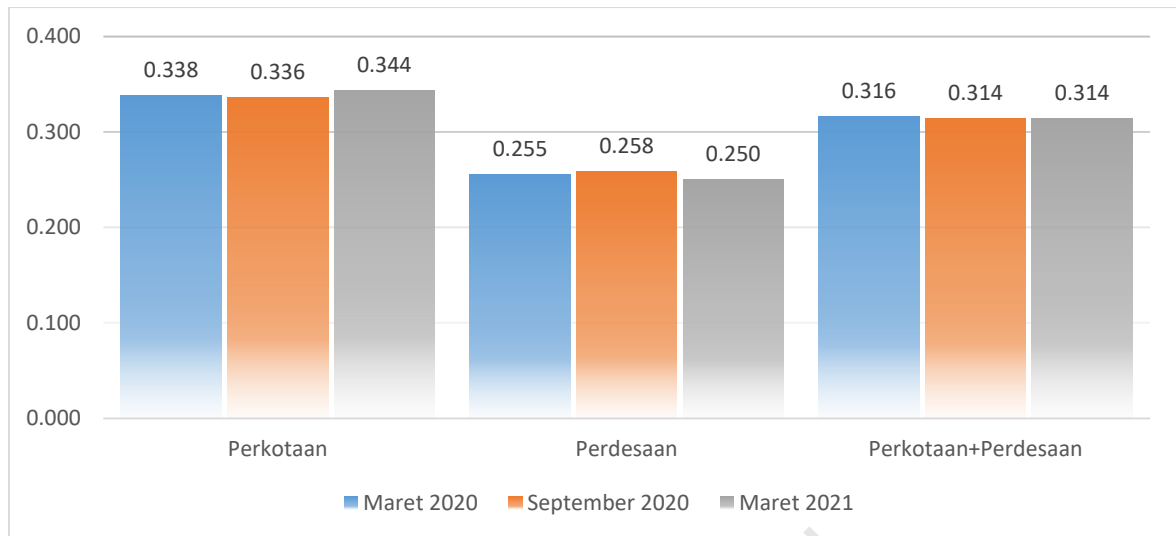
Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk adalah Gini Rasio. Selain itu, Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Secara umum angka Gini Rasio pada Maret 2020 - Maret 2021 di Sumatera Utara mengalami penurunan, sedangkan di daerah perkotaan meningkat dan perdesaan mengalami penurunan. Peningkatan angka Gini Rasio mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin memburuk. Sebaliknya, penurunan angka Gini Rasio mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin membaik.

Pada Maret 2020 - Maret 2021 angka Gini Rasio Sumatera Utara mengalami penurunan. Jika dilihat menurut wilayah, di perdesaan juga mengalami penurunan, namun di daerah perkotaan justru mengalami peningkatan.

Pada Maret 2020, angka Gini Rasio Sumatera Utara sebesar 0,316, selama kurun waktu satu tahun, pada Maret 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,002 menjadi 0,314. Apabila dilihat berdasarkan daerah, angka Gini Rasio di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada Maret 2020, angka Gini Rasio di perkotaan adalah 0,338 dan di perdesaan adalah 0,255. Pada Maret 2021, angka Gini Rasio di perkotaan 0,344, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan menjadi 0,250. Artinya bahwa selama satu tahun terakhir, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perkotaan relatif meningkat, sedangkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan semakin menurun.

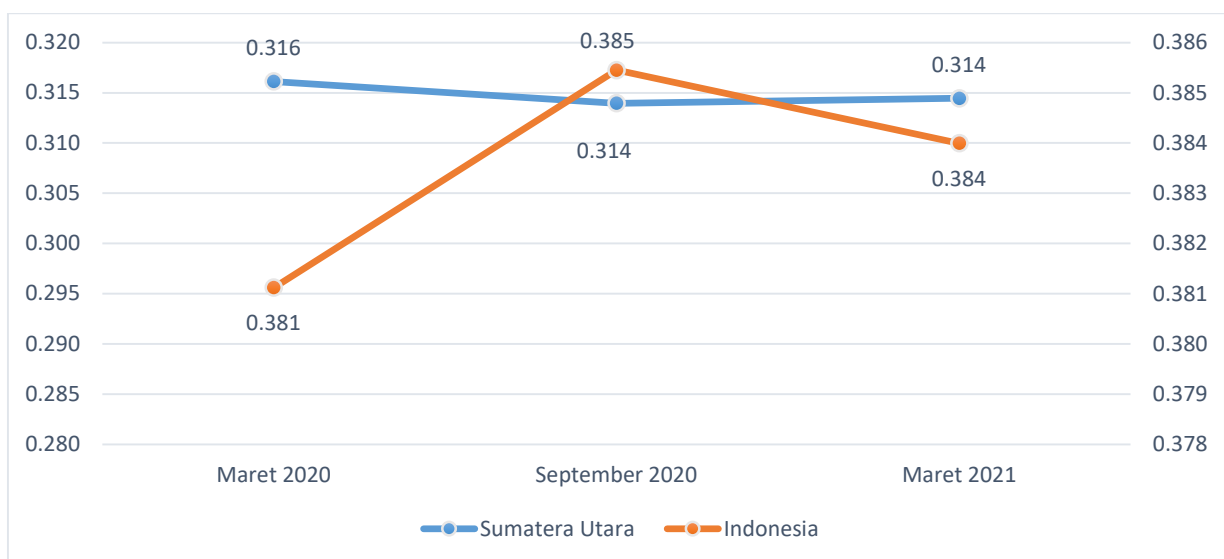
Gambar 3.11
Gini Rasio Sumatera Utara menurut Daerah
Maret 2020 - Maret 2021



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020 - Maret 2021

Apabila dibandingkan secara nasional, angka Gini Rasio Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan angka Gini Rasio Indonesia. Pada periode Maret 2020 - Maret 2021, angka Gini Rasio Sumatera Utara dan Indonesia menunjukkan kecenderungan pola yang berbeda, Gini Rasio Indonesia dan Gini Rasio Sumatera Utara mengalami penurunan dan peningkatan. Pada Maret 2020, Gini Rasio Sumatera Utara sebesar 0,316 dan Gini Rasio Indonesia 0,381. Selama setahun, Gini Rasio Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,002 poin menjadi 0,314 dan Gini Rasio Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,003 poin menjadi 0,384 pada Maret 2021.

Gambar 3.12
Perbandingan Gini Rasio Sumatera Utara dan Indonesia
Maret 2020 - Maret 2021



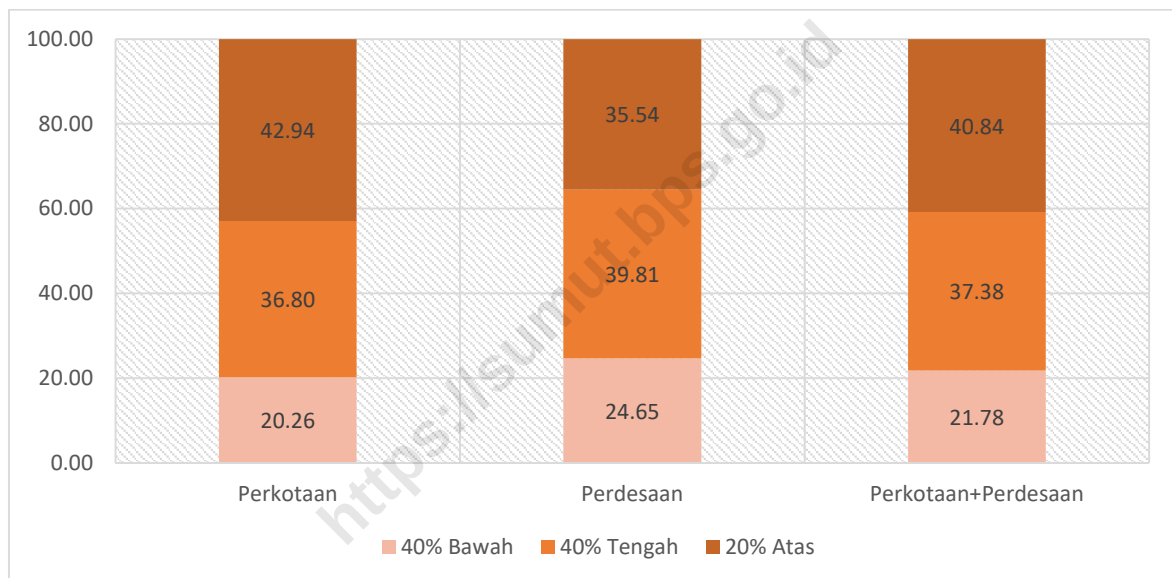
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2020 - Maret 2021

4.2 Kriteria Bank Dunia

Untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk, selain Gini Rasio juga bisa digunakan indikator lain yaitu Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara tergolong kategori rendah (*low inequality*), karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah di atas 17 persen, yaitu sebesar 21,78 persen.

Gambar 3.13
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2021

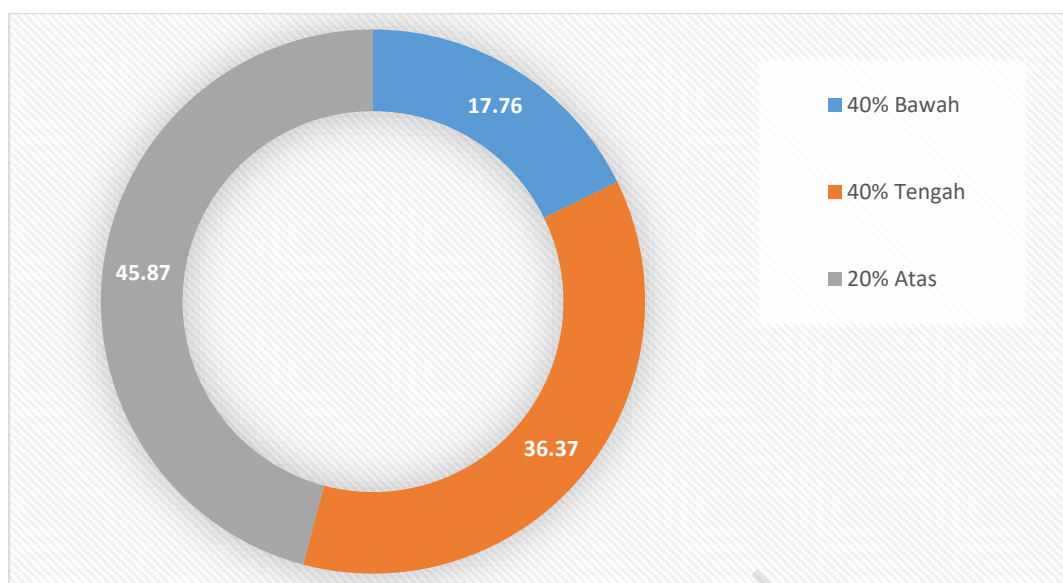


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Apabila dilihat berdasarkan daerah pada Maret 2021 baik di perkotaan maupun perdesaan ketimpangan pengeluaran penduduk termasuk kategori rendah (*low inequality*). Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di perkotaan (20,26 persen) lebih rendah dibanding perdesaan (24,65 persen).

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021 baik di perkotaan maupun perdesaan ketimpangan pengeluaran penduduk di Sumatera Utara termasuk kategori rendah (*low inequality*).

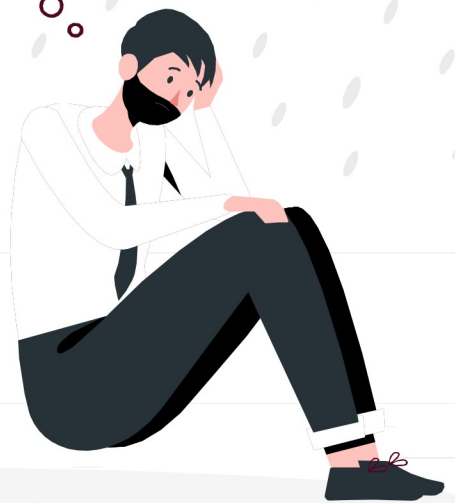
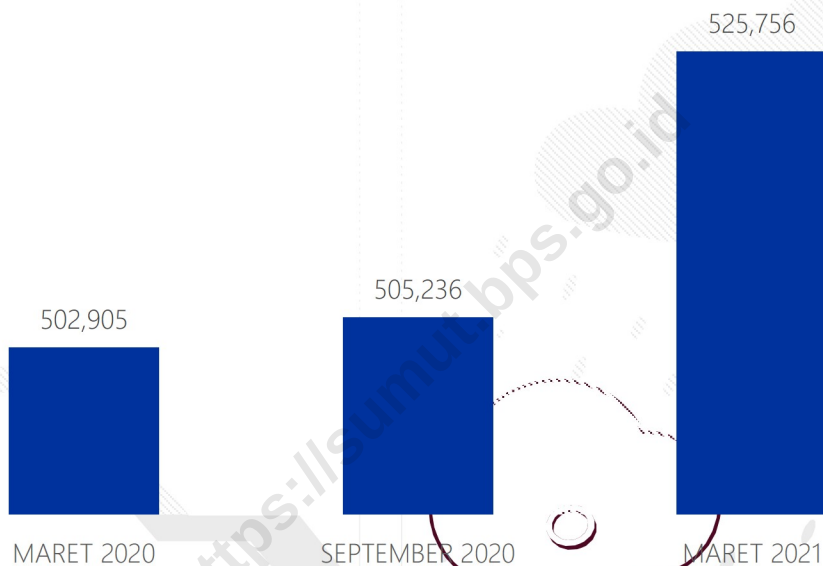
Gambar 3.14
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia menurut Kriteria Bank Dunia, Maret 2021



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Apabila dibandingkan dengan angka nasional, berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk baik di Indonesia maupun Sumatera Utara termasuk kategori rendah (*low inequality*) yaitu 21,78 persen untuk Sumatera Utara dan 17,76 persen untuk Indonesia.

Garis Kemiskinan Sumatera Utara Maret 2020 – Maret 2021 (Rp/kapita/bulan)



PENUTUP

Perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara selama periode Maret 2020 - Maret 2021 mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 60,57 ribu orang atau secara persentase naik sebesar 0,26 poin, yaitu dari 1.283,29 ribu orang (8,75 persen) pada Maret 2020 menjadi 1.343,86 ribu orang (9,01 persen) pada Maret 2021. Apabila dilihat berdasarkan daerah, pada periode Maret 2020 - Maret 2021, penduduk miskin di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,42 poin -lebih tinggi dibanding di perdesaan- yaitu dari 8,73 persen menjadi 9,15 persen atau naik sebanyak 60,06 ribu orang, yaitu dari 695,75 ribu orang menjadi 755,81 ribu orang. Penduduk miskin di perdesaan mengalami peningkatan sebesar 0,07 poin dari 8,77 persen menjadi 8,84 persen atau naik sebanyak 0,51 ribu orang yaitu dari 587,54 ribu orang menjadi 588,05 ribu orang.

Perkembangan garis kemiskinan selama periode Maret 2020 - Maret 2021 cenderung meningkat secara konsisten. Garis kemiskinan Sumatera Utara pada Maret 2020 adalah Rp. 502.904,- per kapita per bulan. Angka ini pada Maret 2021 meningkat sekitar 4,54 persen hingga menjadi Rp. 525.756,- per kapita per bulan. Berdasarkan daerah, garis kemiskinan di perkotaan meningkat sebesar Rp. 24.867,- per kapita per bulan atau 4,80 persen, yaitu dari Rp. 518.218,- per kapita per bulan pada Maret 2020 meningkat menjadi Rp. 543.085,- per kapita per bulan pada Maret 2021. Sedangkan, garis kemiskinan di perdesaan meningkat sebesar Rp. 19.968,- per kapita per bulan atau 4,12 persen, yaitu dari Rp. 484.717,- per kapita per bulan pada Maret 2019 meningkat menjadi Rp. 504.685,- per kapita per bulan pada Maret 2021.

Dilihat berdasarkan daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan garis kemiskinan makanan mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perkotaan lebih besar dibanding perdesaan. Di perdesaan, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 77,67 persen, dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 22,33 persen. Sedangkan di perkotaan, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,28 persen dan kontribusi garis kemiskinan non makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 26,72 persen.

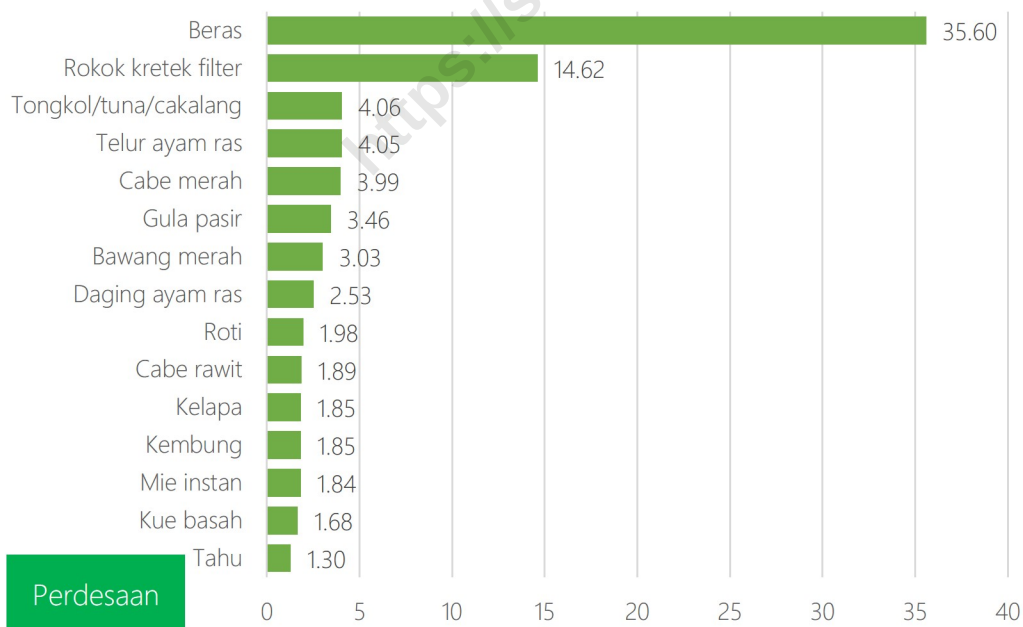
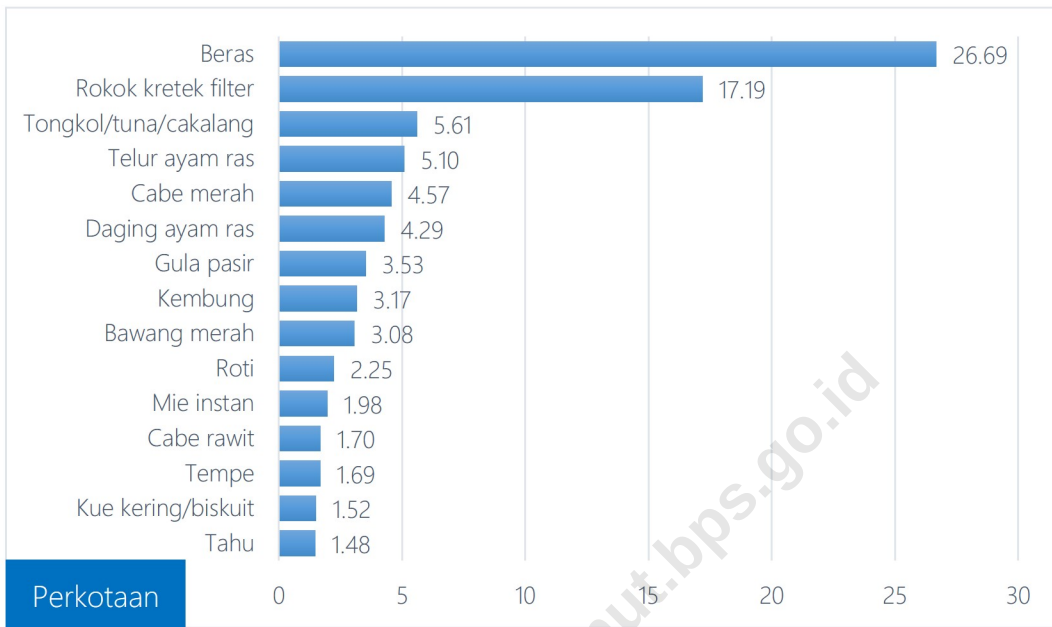
Selama periode Maret 2020 - Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) Sumatera Utara naik sebesar 0,009 poin, yaitu dari 1,513 pada Maret 2020 menjadi 1,522 pada Maret 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan.

Namun pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Sumatera Utara, selama periode Maret 2020 - Maret 2021 turun sebesar 0,012 poin, yaitu dari 0,388 pada Maret 2020 menjadi 0,376 pada Maret 2021. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sumatera Utara semakin rendah.

Pada Maret 2020 - Maret 2021, angka Gini Rasio di Sumatera Utara mengalami penurunan, terutama di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan mengalami peningkatan. Angka Gini Rasio Sumatera Utara mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,002 dari 0,316 pada Maret 2020 menjadi 0,314 pada Maret 2021. Apabila dilihat berdasarkan daerah, angka Gini Rasio di perkotaan lebih tinggi dibanding perdesaan. Pada Maret 2020, angka Gini Rasio di perkotaan adalah 0,338 dan di perdesaan adalah 0,255. Pada Maret 2021, angka Gini Rasio di perkotaan meningkat menjadi 0,344, sedangkan di perdesaan justru mengalami penurunan menjadi 0,250.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara tergolong kategori rendah (*low inequality*), karena porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen terendah di atas 17 persen, yaitu sebesar 21,78 persen. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,26 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,65 persen yang artinya keduanya berada pada kategori ketimpangan rendah.

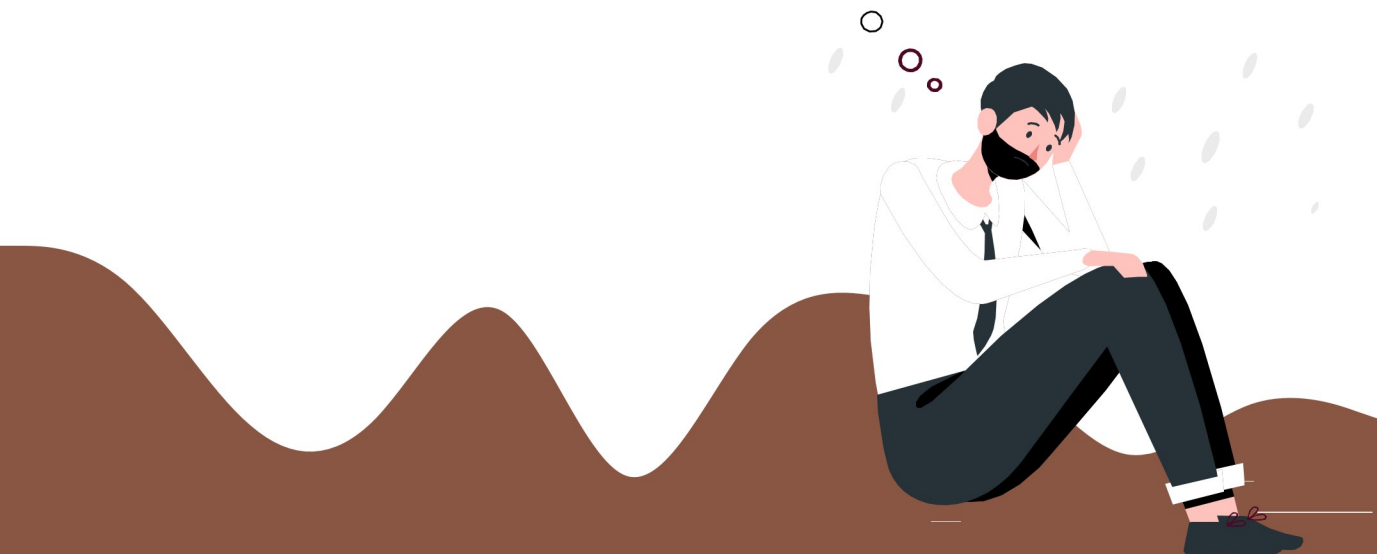
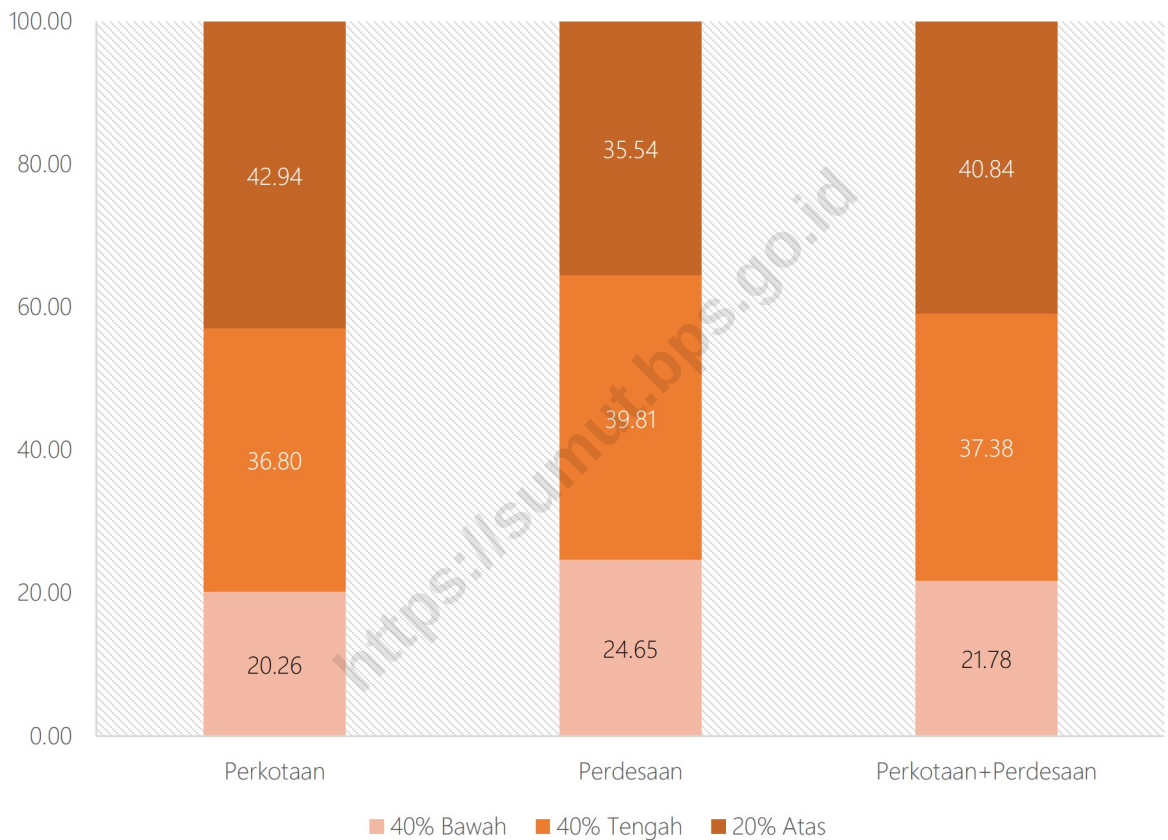
Share Basket Komoditi Makanan Utama terhadap Garis Kemiskinan Makanan Berdasarkan Daerah (%), Maret 2021



DAFTAR PUSTAKA

- Bank Dunia. (1990). *Indonesia: Poverty Assessment and Strategy Report*. Report, No. 8034-IND, Country Department III East Asia and Pacific Region. Washington.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- BPS & World Bank Institute. (2002). *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta.
- BPS. (2014). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: BPS.
- Madden, D. dan Smith, F. (2000). *Poverty in Ireland, 1987-1994: A Stochastic Dominance Approach*. The Economic and Social Review, Vol. 31, 187-214.
- Ravallion, M. (1992). *Poverty Comparisons. A Guide to Concepts and Methods*. LSMS Working Paper Number 88, The World Bank, Washington, D.C.
- Todaro, Michael. P. (1989). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Erlangga (Terjemahan).
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank Institute. (2005). *Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual*. World Bank Institute.

Distribusi Pengeluaran Penduduk Sumatera Utara menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, Maret 2021



Lampiran 1

Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021

	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
11	Aceh	10,46	17,78	15,33
12	Sumatera Utara	9,15	8,84	9,01
13	Sumatera Barat	5,30	7,91	6,63
14	Riau	6,52	7,51	7,12
15	Jambi	11,52	6,42	8,09
16	Sumatera Selatan	12,36	13,12	12,84
17	Bengkulu	15,10	15,28	15,22
18	Lampung	9,29	14,18	12,62
19	Bangka Belitung	3,57	6,63	4,90
21	Kepulauan Riau	5,72	11,10	6,12
31	DKI Jakarta	4,72		4,72
32	Jawa Barat	7,82	10,46	8,40
33	Jawa Tengah	10,58	13,07	11,79
34	DI Yogyakarta	12,23	14,44	12,80
35	Jawa Timur	8,38	15,05	11,40
36	Banten	5,93	8,49	6,66
51	Bali	4,12	5,52	4,53
52	Nusa Tenggara Barat	14,92	13,37	14,14
53	Nusa Tenggara Timur	8,60	25,08	20,99
61	Kalimantan Barat	4,68	8,54	7,15
62	Kalimantan Tengah	4,86	5,38	5,16
63	Kalimantan Selatan	3,89	5,71	4,83
64	Kalimantan Timur	5,01	9,87	6,54
65	Kalimantan Utara	5,85	9,82	7,36
71	Sulawesi Utara	5,36	10,61	7,77
72	Sulawesi Tengah	9,15	14,73	13,00
73	Sulawesi Selatan	4,77	12,05	8,78
74	Sulawesi Tenggara	7,66	13,89	11,66
75	Gorontalo	4,23	24,47	15,61
76	Sulawesi Barat	9,82	11,67	11,29
81	Maluku	6,29	26,96	17,87
82	Maluku Utara	5,13	7,59	6,89
91	Papua Barat	6,50	33,40	21,84
94	Papua	4,91	35,71	26,86
INDONESIA		7,89	13,10	10,14

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Lampiran 2

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021

	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
11	Aceh	190,43	643,81	834,24
12	Sumatera Utara	755,81	588,05	1.343,86
13	Sumatera Barat	145,58	225,09	370,67
14	Riau	183,75	317,06	500,81
15	Jambi	137,24	156,61	293,86
16	Sumatera Selatan	402,25	711,51	1.113,76
17	Bengkulu	100,46	205,54	306,00
18	Lampung	254,60	829,33	1.083,93
19	Bangka Belitung	29,84	42,87	72,71
21	Kepulauan Riau	124,90	19,57	144,46
31	DKI Jakarta	501,92		501,92
32	Jawa Barat	3.051,05	1.144,29	4.195,34
33	Jawa Tengah	1.908,33	2.201,43	4.109,75
34	DI Yogyakarta	358,66	147,80	506,45
35	Jawa Timur	1.840,21	2.732,51	4.572,73
36	Banten	552,96	314,27	867,23
51	Bali	129,58	72,39	201,97
52	Nusa Tenggara Barat	391,89	354,77	746,66
53	Nusa Tenggara Timur	118,76	1.050,55	1.169,31
61	Kalimantan Barat	86,90	280,99	367,89
62	Kalimantan Tengah	54,46	85,58	140,04
63	Kalimantan Selatan	81,12	126,99	208,11
64	Kalimantan Timur	127,28	114,48	241,77
65	Kalimantan Utara	25,96	26,91	52,86
71	Sulawesi Utara	73,17	123,17	196,35
72	Sulawesi Tengah	88,31	316,14	404,44
73	Sulawesi Selatan	191,50	593,48	784,98
74	Sulawesi Tenggara	75,05	243,65	318,70
75	Gorontalo	22,09	164,19	186,29
76	Sulawesi Barat	27,82	129,37	157,19
81	Maluku	49,78	272,03	321,81
82	Maluku Utara	18,54	68,62	87,16
91	Papua Barat	28,01	191,06	219,07
94	Papua	48,36	872,08	920,44
	INDONESIA	12.176,58	15.366,19	27.542,77

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Lampiran 3

Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021

	Provinsi	Gini Rasio		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
11	Aceh	0,362	0,275	0,324
12	Sumatera Utara	0,344	0,250	0,314
13	Sumatera Barat	0,329	0,254	0,306
14	Riau	0,367	0,279	0,326
15	Jambi	0,354	0,288	0,321
16	Sumatera Selatan	0,360	0,315	0,341
17	Bengkulu	0,384	0,264	0,326
18	Lampung	0,346	0,288	0,323
19	Bangka Belitung	0,265	0,221	0,256
21	Kepulauan Riau	0,341	0,256	0,343
31	DKI Jakarta	0,409		0,409
32	Jawa Barat	0,423	0,321	0,412
33	Jawa Tengah	0,398	0,325	0,372
34	DI Yogyakarta	0,448	0,334	0,441
35	Jawa Timur	0,387	0,324	0,374
36	Banten	0,369	0,280	0,365
51	Bali	0,387	0,301	0,378
52	Nusa Tenggara Barat	0,413	0,332	0,381
53	Nusa Tenggara Timur	0,327	0,311	0,346
61	Kalimantan Barat	0,341	0,267	0,313
62	Kalimantan Tengah	0,353	0,292	0,323
63	Kalimantan Selatan	0,359	0,265	0,330
64	Kalimantan Timur	0,339	0,288	0,334
65	Kalimantan Utara	0,289	0,272	0,292
71	Sulawesi Utara	0,365	0,352	0,365
72	Sulawesi Tengah	0,343	0,279	0,316
73	Sulawesi Selatan	0,392	0,338	0,382
74	Sulawesi Tenggara	0,411	0,347	0,390
75	Gorontalo	0,398	0,397	0,408
76	Sulawesi Barat	0,446	0,321	0,356
81	Maluku	0,301	0,258	0,314
82	Maluku Utara	0,298	0,265	0,300
91	Papua Barat	0,322	0,407	0,380
94	Papua	0,301	0,422	0,397
	INDONESIA	0,401	0,315	0,384

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Lampiran 4

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021

Daerah: Perkotaan

Provinsi		Persentase Pengeluaran pada Kelompok Penduduk		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
11	Aceh	18,73	37,01	44,26
12	Sumatera Utara	20,26	36,80	42,94
13	Sumatera Barat	20,60	37,44	41,96
14	Riau	19,40	34,63	45,97
15	Jambi	19,04	37,54	43,42
16	Sumatera Selatan	17,84	39,46	42,69
17	Bengkulu	17,82	36,13	46,06
18	Lampung	19,66	37,43	42,91
19	Bangka Belitung	24,64	37,58	37,78
21	Kepulauan Riau	19,07	39,34	41,59
31	DKI Jakarta	16,65	35,34	48,00
32	Jawa Barat	15,70	35,20	49,10
33	Jawa Tengah	17,17	35,51	47,32
34	DI Yogyakarta	14,87	33,49	51,64
35	Jawa Timur	17,49	36,38	46,12
36	Banten	18,39	36,78	44,83
51	Bali	17,27	36,58	46,14
52	Nusa Tenggara Barat	15,84	36,30	47,85
53	Nusa Tenggara Timur	20,14	39,06	40,80
61	Kalimantan Barat	19,57	37,90	42,52
62	Kalimantan Tengah	18,80	38,39	42,81
63	Kalimantan Selatan	19,17	36,44	44,38
64	Kalimantan Timur	20,23	37,13	42,64
65	Kalimantan Utara	22,56	38,98	38,46
71	Sulawesi Utara	18,11	38,46	43,43
72	Sulawesi Tengah	18,92	39,51	41,57
73	Sulawesi Selatan	16,80	37,35	45,85
74	Sulawesi Tenggara	15,73	37,36	46,91
75	Gorontalo	16,92	35,90	47,18
76	Sulawesi Barat	15,72	31,55	52,73
81	Maluku	21,95	38,65	39,40
82	Maluku Utara	21,25	40,87	37,88
91	Papua Barat	20,81	38,34	40,85
94	Papua	21,65	39,36	38,99
INDONESIA		16,81	36,03	47,16

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

Lanjutan

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Provinsi dan Daerah, Maret 2021

Daerah: Perdesaan

	Provinsi	Persentase Pengeluaran pada Kelompok Penduduk		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
11	Aceh	22,73	40,87	36,40
12	Sumatera Utara	24,65	39,81	35,54
13	Sumatera Barat	24,71	39,07	36,22
14	Riau	23,37	38,58	38,06
15	Jambi	22,48	39,39	38,13
16	Sumatera Selatan	20,61	39,84	39,56
17	Bengkulu	23,40	40,86	35,73
18	Lampung	22,27	39,86	37,88
19	Bangka Belitung	27,05	38,51	34,44
21	Kepulauan Riau	23,89	40,69	35,42
31	DKI Jakarta			
32	Jawa Barat	20,30	39,56	40,14
33	Jawa Tengah	20,19	39,19	40,62
34	DI Yogyakarta	19,86	38,79	41,35
35	Jawa Timur	20,35	38,89	40,76
36	Banten	22,82	39,62	37,55
51	Bali	21,34	40,01	38,65
52	Nusa Tenggara Barat	19,27	40,37	40,36
53	Nusa Tenggara Timur	20,58	40,31	39,11
61	Kalimantan Barat	23,18	40,89	35,93
62	Kalimantan Tengah	22,11	39,64	38,25
63	Kalimantan Selatan	23,69	39,79	36,52
64	Kalimantan Timur	22,65	38,89	38,46
65	Kalimantan Utara	23,66	38,91	37,43
71	Sulawesi Utara	18,71	38,75	42,53
72	Sulawesi Tengah	23,07	39,54	37,40
73	Sulawesi Selatan	19,15	39,93	40,92
74	Sulawesi Tenggara	18,71	39,54	41,75
75	Gorontalo	16,29	37,49	46,22
76	Sulawesi Barat	20,24	39,86	39,90
81	Maluku	24,25	39,50	36,25
82	Maluku Utara	23,94	39,23	36,83
91	Papua Barat	15,97	36,33	47,70
94	Papua	15,32	35,52	49,16
INDONESIA		20,68	39,58	39,74

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021

**Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Menurut Provinsi dan Daerah,
Maret 2021**

Daerah: Perkotaan + Perdesaan

Provinsi		Persentase Pengeluaran pada Kelompok Penduduk		
		40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
11	Aceh	20,67	38,46	40,87
12	Sumatera Utara	21,78	37,38	40,84
13	Sumatera Barat	22,19	37,43	40,38
14	Riau	21,40	36,34	42,26
15	Jambi	20,93	38,09	40,98
16	Sumatera Selatan	19,22	39,09	41,69
17	Bengkulu	20,80	37,95	41,25
18	Lampung	20,64	38,51	40,85
19	Bangka Belitung	25,19	37,91	36,90
21	Kepulauan Riau	19,09	39,14	41,77
31	DKI Jakarta	16,65	35,34	48,00
32	Jawa Barat	16,34	35,49	48,17
33	Jawa Tengah	18,34	36,76	44,90
34	DI Yogyakarta	15,44	33,17	51,39
35	Jawa Timur	18,19	36,79	45,02
36	Banten	18,78	36,63	44,59
51	Bali	17,85	36,84	45,31
52	Nusa Tenggara Barat	17,35	37,78	44,87
53	Nusa Tenggara Timur	18,94	38,96	42,10
61	Kalimantan Barat	21,27	38,45	40,28
62	Kalimantan Tengah	20,52	38,66	40,82
63	Kalimantan Selatan	20,79	37,25	41,96
64	Kalimantan Timur	20,50	37,29	42,20
65	Kalimantan Utara	22,44	38,83	38,72
71	Sulawesi Utara	18,09	38,26	43,65
72	Sulawesi Tengah	21,17	38,32	40,50
73	Sulawesi Selatan	17,38	37,61	45,01
74	Sulawesi Tenggara	16,97	37,36	45,67
75	Gorontalo	16,05	36,60	47,35
76	Sulawesi Barat	19,02	37,68	43,31
81	Maluku	21,28	38,16	40,55
82	Maluku Utara	21,91	38,74	39,35
91	Papua Barat	17,00	38,46	44,54
94	Papua	15,74	38,43	45,82
INDONESIA		17,76	36,37	45,87

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2021



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Asrama No. 179 Medan 20123

Telp : (061) 8452343, Fax : (061) 8452773

Homepage : <http://sumut.bps.go.id> E-mail : bps1200@bps.go.id

ISSN 2615-8620



9 772615 862007